

## **Analisis Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan Belanja Daerah Di Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Barru**

**Puspita Ratnaningsih<sup>1</sup>, Yana Fajriah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Manajemen Program Studi Manajemen Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja keuangan dalam pelaksanaan belanja daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru. Populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) di tahun 2019-2021. Pengambilan sampel dilakukan teknik sampling jenuh. Teknik analisis data yang digunakan dengan deskriptif kuantitatif. Data dikumpulkan dengan metode pencatatan dokumen dan kemudian dianalisis dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio analisis varian belanja, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada analisis varian belanja dengan rata-rata rasio 31,37% berkategori *favourable variance* atau selisih disukai karena nilai realisasi belanja daerah lebih rendah daripada anggaran belanja. Keserasian belanja operasi berada diangka rata-rata 95,76% sedangkan keserasian belanja modal berada diangka rata-rata 4,24% yang artinya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru memprioritaskan belanja operasional jangka pendek tahunannya dari APBD dibandingkan dengan belanja modal untuk pembangunan jangka panjang. Sedangkan, tingkat efisiensi belanja daerah berada diangka rata-rata 68,63% kurang dri 100% yang menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru telah melakukan penghematan anggaran secara efisien.

**Kata Kunci:** *desentralisasi fiskal, analisis varian belanja, keserasian dan efisiensi belanja daerah*

Copyright (c) 2023 Puspita Ratnaningsih

---

✉ Corresponding author :

Email Address : [puspita.ratnaningsih03@gmail.com](mailto:puspita.ratnaningsih03@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah tidak serta merta ditafsirkan sebagai bentuk penyerahan kekuasaan tanpa kontrol. Pelaksanaan otonomi daerah tetap dikawal oleh peraturan yang berlaku agar pelaksanaan desentralisasi berada di jalur yang tepat. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Lebih lanjut dalam ayat (3) dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah pusat. Urusan pemerintah pusat yang tidak boleh diintervensi oleh pemerintah daerah, yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan agama (Maulina dkk., 2021).

Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah adalah mengelola keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Nomor

12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, keuangan daerah didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah sehubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Definisi inilah yang kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bergerak di area keuangan daerah (Maulina dkk., 2021). Untuk mencapai pengelolaan keuangan daerah yang baik diperlukan analisis dan evaluasi pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan menganalisis faktor-faktor yang dapat menjadi celah signifikan untuk memaksimalkan keuangan daerah. Hal ini diperlukan karena hasil pengukuran kinerja keuangan dapat memberi perspektif tambahan bagi pengelola keuangan daerah untuk meningkatkan kualitas keuangan daerah (Maulina dkk., 2021).

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Belanja Daerah (LRA-APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru, terjadi penurunan kinerja keuangan di tahun 2020 dalam hal pengurangan anggaran belanja daerah untuk kegiatan perjalanan dinas dalam daerah sebesar 89,99% dan luar daerah sebesar 69,52% dari Daftar Pengguna Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan di awal tahun. Pengurangan ini dilakukan dalam rangka bantuan penanganan COVID-19 di sekitar wilayah Kabupaten Barru. Pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan belanja daerah juga didukung dari hasil penelitian yang dilakukan Saputra, dkk. (2018) yang menyatakan bahwa terdapat rasio keserasian belanja di Kabupaten Jembran tahun menunjukkan realisasi belanja lebih banyak pada belanja operasional sedangkan rasio efisiensi belanja termasuk dalam kategori efisien. Penelitian ini juga didukung dengan hasil penelitian dari Mataris & Digdowiseiso (2022) yang menunjukkan Pemerintah Kabupaten Magelang tidak efisien dalam pengelolaan keuangan daerah dilihat dari realisasi belanjanya, dan masih mengutamakan belanja operasionalnya dibandingkan belanja modalnya yang dilihat dari rasio keserasian belanja daerahnya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis kinerja keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru selama periode 2019–2021 dengan melalui rasio keuangan yaitu Analisis Varian Belanja, Rasio Keserasian dan Rasio Efisiensi Belanja. Bagi ilmu pengetahuan, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dalam bidang ilmu keuangan khususnya mengenai pengukuran kinerja keuangan dalam pengelolaan belanja daerah. Bagi peneliti, diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam bidang keuangan daerah serta meningkatkan kemampuan analisis tentang kinerja pengelolaan belanja daerah. Bagi pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Barru diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran di dalam menentukan kebijakan pengelolaan dan peningkatan kinerja keuangan dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **METODOLOGI**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru. Populasi dalam penelitian ini adalah data sekunder Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA-APBD) periode tahun 2019, 2020 dan 2021. Pengambilan sampel dilakukan teknik sampling jenuh. Data dikumpulkan dan dianalisis dengan rasio keuangan yang terdiri dari rasio analisis varian belanja, rasio keserasian, rasio efisiensi belanja.

### A. Analisis Varian Belanja

$$\text{Analisis Varian belanja} = \frac{\text{Selisih Realisasi dan Anggaran Belanja Tahun } t}{\text{Anggaran Belanja Tahun } t} \times 100\%$$

Selisih anggaran belanja dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu :

- a) Selisih disukai (*favourable variance*), dalam hal realisasi belanja lebih kecil dari anggarannya.
- b) Selisih tidak disukai (*unfavourable variance*), dalam hal realisasi belanja lebih besar dari anggarannya. (Mahmudi, 2016:136) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

### B. Rasio Keserasian

Ada dua Analisis Belanja yang digunakan untuk mengetahui Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yaitu sebagai berikut:

#### 1. Analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

#### 2. Analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

### C. Rasio Efisiensi Belanja

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Anggaran Belanja Daerah}} \times 100\%$$

**Tabel 1. Kriteria Efisiensi**

Presentase Efisiensi	Kriteria Efisiensi
100% keatas	Tidak Efisien
90%-100%	Kurang Efisien
80%-90%	Cukup Efisien
60%-80%	Efisien
Kurang Dari 60%	Sangat Efisien

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kinerja Keuangan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru dimaksudkan untuk memberi penilaian sejauh mana tingkat pengelolaan keuangan daerah yang telah berjalan dalam rentang waktu tiga tahun, yaitu tahun 2019 - 2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Data ini yang kemudian akan mengungkap apakah kinerja keuangan daerah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru berada pada level cukup, cukup baik, baik, atau sangat baik. Data yang menjadi fokus kajian penelitian ini adalah data sekunder Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru yang analisisnya dibatasi pada Kinerja Keuangan

Daerah Tahun 2019-2021. Adapun data sekunder yang digunakan untuk analisa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.** Anggaran Belanja Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>Belanja</b>	<b>287.765.080.658</b>	<b>278.602.961.092</b>	<b>279.611.410.216</b>
<b>Belanja Operasi</b>			
a. Belanja Pegawai	231.400.515.543	229.773.021.408	236.656.232.227
b. Belanja Barang	40.390.623.241	35.025.952.180	21.646.625.532
c. Belanja Hibah	0	0	6.515.000.000
<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>271.791.138.784</b>	<b>264.798.973.588</b>	<b>264.817.857.759</b>
<b>Belanja Modal</b>			
a. Belanja Peralatan dan Mesin	3.287.637.178	6.857.332.690	6.217.482.025
b. Belanja Bangunan dan Gedung	8.270.127.301	4.081.108.436	7.625.749.782
c. Belanja Aset Tetap Lainnya	4.416.177.395	2.865.546.383	950.320.650
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>15.973.941.874</b>	<b>13.803.987.509</b>	<b>14.793.552.457</b>

**Sumber:** Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

**Tabel 3.** Realisasi Belanja Daerah  
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (rupiah)

Jenis Belanja	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
<b>Belanja</b>	<b>198.161.699.374</b>	<b>193.326.682.356</b>	<b>189.131.065.346</b>
<b>Belanja Operasi</b>			
a. Belanja Pegawai	166.618.178.633	157.674.800.015	164.181.400.655
b. Belanja Barang	24.220.116.128	26.993.500.115	13.548.666.545
c. Belanja Hibah	0	0	5.593.450.000

<b>Total Belanja Operasi</b>	<b>190.838.294.761</b>	<b>184.668.300.130</b>	<b>180.526.792.200</b>
<b>Belanja Modal</b>			
a. Belanja Peralatan dan Mesin	1.874.031.830	4.709.154.770	4.354.176.150
b. Belanja Bangunan dan Gedung	3.979.230.037	2.085.649.825	3.452.197.000
c. Belanja Aset Tetap Lainnya	1.470.142.746	1.863.577.633	797.900.000
<b>Total Belanja Modal</b>	<b>7.323.404.613</b>	<b>8.658.382.228</b>	<b>8.604.273.150</b>

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Untuk menganalisa kinerja keuangan daerah di atas, maka peneliti menerapkan penghitungan berdasarkan Rasio Analisis Varian Belanja, Rasio Keserasian Belanja yang dibuat dalam 2 model, yaitu Rasio Belanja Operasi dan Rasio Belanja Modal serta Rasio Efisiensi Belanja. Perhitungan terhadap seluruh variabel, dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Analisis Varian Belanja

Analisis varian merupakan analisis terhadap perbedaan atau selisih antara realisasi belanja dengan anggaran (Mahmudi 2010:157) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

Tabel 4. Analisis Varian Belanja Tahun 2019-2021

Tahun	Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Selisih (Rp)	Rasio (%)	Varian
2019	287.765.080.657	198.161.699.373	-89.603.381.285	31,14	Favourable Variance
2020	278.602.961.092	193.326.682.356	-85.276.278.737	30,61	Favourable Variance
2021	279.611.410.216	189.131.065.346	-90.480.344.870	32,36	Favourable Variance

Rata - Rata Rasio Analisis Varian Belanja	31,37
---	-------

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 4 dapat dilihat terdapat selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja yang bersaldo negatif dan termasuk dalam varian *favourable variance*, yang menunjukkan adanya penghematan anggaran belanja. Pada tahun 2019, realisasi belanja Rp198.161.699.373 dan anggaran belanja sebesar Rp287.765.080.657 terdapat selisih belanja sebesar Rp89.603.381.285 atau sebesar 31,14% termasuk dalam varian *favourable variance*. Begitupun juga pada tahun 2020, realisasi belanja Rp193.326.682.356 dan anggaran belanja sebesar Rp278.602.961.092 terdapat selisih belanja sebesar Rp85.276.278.737 atau sebesar 30,61% termasuk dalam varian *favourable variance*. Sedangkan pada tahun 2021 realisasi belanja Rp189.131.065.346 dan anggaran belanja sebesar Rp279.611.410.216 terdapat selisih belanja Rp90.480.344.870 atau sebesar 32,36% termasuk dalam varian *favourable variance*. Rata-rata rasio analisis varian belanja dalam kurun waktu tiga tahun sebesar 31,37%.

## 2. Analisis Keserasian Belanja

Analisis keserasian belanja bermanfaat untuk mengetahui keseimbangan antarbelanja. Hal ini terkait dengan fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, dan stabilisasi (Mahmudi, 2010:162) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

### a. Analisis Keserasian Belanja Operasi Terhadap Total Belanja

Analisis belanja operasi terhadap total belanja merupakan perbandingan antara total realisasi belanja operasi dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja operasi pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi, 2010: 164) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

Tabel 5. Analisis Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Tahun 2019-2021

Tahun	Total Belanja Operasi (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Operasi Terhadap Total Belanja Daerah (%)
2019	190.838.294.761	198.161.699.374	96,30
2020	184.668.300.130	193.326.682.356	95,52
2021	180.526.792.200	189.131.065.346	95,45
Rata-Rata Rasio Keserasian Belanja Operasional			95,76

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan perbandingan belanja operasional yang telah direalisasikan dengan total belanja daerah. Pada tahun 2019, belanja operasional yang telah direalisasikan sebesar Rp190.838.294.761 dibandingkan dengan total belanja daerah sebesar Rp198.161.699.374 dengan rasio 96,30%. Pada tahun 2020, belanja operasional yang telah direalisasikan sebesar Rp184.668.300.130

dibandingkan total belanja daerah sebesar Rp193.326.682.356 dengan rasio 95,52%. Sedangkan tahun 2021, belanja operasional yang telah direalisasikan sebesar Rp180.526.792.200 dibandingkan total belanja daerah sebesar Rp189.131.065.346 dengan rasio 95,45%. Rata-rata keserasian belanja operasional dalam kurun waktu tiga tahun sebesar 95,76%.

#### b. Analisis Keserasian Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

Analisis Keserasian belanja modal terhadap total belanja daerah merupakan perbandingan antara total realisasi belanja modal dengan total belanja. Rasio ini memberikan informasi mengenai porsi belanja daerah yang dialokasikan untuk belanja modal pada tahun anggaran bersangkutan (Mahmudi 2010: 164) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

**Tabel 6. Analisis Belanja Modal Terhadap Total Belanja Tahun 2019-2021**

Tahun	Total Realisasi Belanja Modal (Rp)	Total Belanja Daerah (Rp)	Rasio Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah (%)
2019	7.323.404.613	198.161.699.374	3,70
2020	8.658.382.228	193.326.682.356	4,48
2021	8.604.273.150	189.131.065.346	4,55
Rata-Rata Rasio Keserasian Belanja Modal			4,24

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan perbandingan belanja modal yang telah direalisasikan dengan total belanja daerah. Dimana pada tahun 2019, belanja modal yang telah direalisasikan sebesar Rp7.323.404.613 dibandingkan dengan total belanja daerah sebesar Rp198.161.699.374 dengan rasio 3,70%. Pada tahun 2020, belanja modal yang telah direalisasikan sebesar Rp8.658.382.228 dibandingkan total belanja daerah sebesar Rp193.326.682.356 dengan rasio 4,48%. Sedangkan pada tahun 2021, belanja modal yang telah direalisasikan sebesar Rp8.604.273.150 dengan total belanja daerah sebesar Rp189.131.065.346 dengan rasio 4,55%. Rata-rata rasio keserasian belanja modal dalam kurun waktu tiga tahun sebesar 4,24%.

#### Analisis Keserasian Belanja

**Tabel 7. Tabel Rasio Keserasian Belanja Tahun 2019-2021**

Tahun	Rasio Belanja Operasi (%)	Rasio Belanja Modal (%)	Total (%)
2019	96,30	3,70	100
2020	95,52	4,48	100

2021	95,45	4,55	100
------	-------	------	-----

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 7 menunjukkan bahwa rasio penggunaan belanja daerah paling banyak dialokasikan ke belanja operasi dibandingkan dengan belanja modal. Dimana, pada tahun 2019, alokasi belanja operasi sebesar 96,30% dan alokasi belanja modal sebesar 3,70%. Pada tahun 2020, alokasi belanja operasi sebesar 95,52% dan alokasi belanja modal sebesar 4,48%. Sedangkan, pada tahun 2021, alokasi belanja operasi sebesar 95,45% dan alokasi belanja modal sebesar 4,55%.

### 3. Rasio Efisiensi Belanja

Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah (Mahmudi 2010: 166) dalam (Rina & Haryadi, 2020).

Tabel 8. Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2019-2021

Tahun	Realisasi Belanja (Rp)	Anggaran Belanja (Rp)	Rasio Efisiensi Belanja (%)	Kriteria
2019	198.161.699.374	287.765.080.658	68,86	Efisiensi
2020	193.326.682.356	278.602.961.092	69,39	Efisiensi
2021	189.131.065.346	279.611.410.216	67,64	Efisiensi
Rata-Rata Rasio Efisiensi Belanja			68,63	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru (Data Diolah)

Berdasarkan tabel 8 menunjukkan terjadi efisiensi penggunaan anggaran belanja. Pada tahun 2019, total realisasi belanja hanya sebesar Rp198.161.699.374 dari total anggaran Rp287.765.080.658 dengan rasio 68,86%. Pada tahun 2020, total realisasi belanja hanya sebesar Rp193.326.682.356 dari total anggaran Rp278.602.961.092 dengan rasio 69,39%. Sedangkan pada tahun 2021, total realisasi belanja hanya sebesar Rp189.131.065.346 dari total anggaran Rp279.611.410.216 dengan rasio 67,64%. Rata-rata rasio efisiensi belanja dalam kurun waktu tiga tahun sebesar 68,63%.

## SIMPULAN

Dari analisis varian belanja dapat diketahui bahwa kinerja keuangan pengelolaan anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 menunjukkan kinerja yang baik dikarenakan ada hasil negatif yang menunjukkan bahwa adanya penghematan penggunaan realisasi anggaran.

a. Dari hasil analisis keserasian belanja dapat diketahui bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru dalam menggunakan aktivitas belanjanya, tidak hanya memfokuskan belanja pada belanja operasi akan tetapi juga belanja modal. Dimana pada

tahun 2019 sampai dengan 2021 tetap secara konsisten alokasi belanja operasional paling banyak dialokasikan dibandingkan dengan belanja modal.

- b. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai tahun 2019 sampai dengan 2021 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru sudah melakukan penghematan anggaran secara efisien.
- c. Secara umum, hasil kinerja anggaran belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Barru berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Daerah-LRA APBD dari tahun 2019 sampai 2021 sudah terlaksana cukup baik.

## Referensi :

- Akhmad. (2018). *Manajemen Keuangan Daerah Dalam Era Otonomi Daerah* (Vol. 16, Nomor 3).
- Hasanah, M., & Anitasari, M. (2020). Analisis Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014-2017 (Tinjauan Efisiensi Dan Efektivitas). *Convergence: The Journal of Economic Development*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/10.33369/convergence-jep.v1i2.10905>
- Mataris, H., & Digdowiseiso, K. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017-2019. In *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* (Vol. 7, Nomor 1). <https://doi.org/10.47313/pjsh.v7i1.1049>
- Maulina, A., Alkamal, M., & Fahira, N. S. (2021). Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 5(2), 390-399. <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. (2020). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. *Kementerian Dalam Negeri*, 1-445. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/162792/permendagri-no-77-tahun-2020>
- Putri, R. S. E. P., & Munandar, A. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2016-2020. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi)*, Vol. 5 No.(3), 2296-2313.
- Rina, E., & Haryadi, M. (2020). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur. *Ekonomia*, 1-11. <http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/4893>
- Saputra, S. C., Suwendra, I. W., & Yudiaatmaja, F. (2018). Saputra, Sandy Candra, Suwendra, I Wayan, and Fridayana Yudiaatmaja. "Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Daerah Di Kabupaten Jembrana Tahun 2010-2014." *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, Bulan Oktober Tahun 2018 4, no. 2 (2018): 136-45. *Bisma: Jurnal Manajemen*, Vol. 4 No. 2, Bulan Oktober Tahun 2018, 4(2), 136-145.
- Sholikhah, A. L., & Priyono, N. (2022). Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara. *Jurnal Akuntansi*, 14(1), 1-12. <https://doi.org/10.28932/jam.v14i1.4309>
- Suha